

**ANALISIS SWASEMBADA PANGAN DI TINGKAT DESA MELALUI
PENDEKATAN PARTISIPATIF
(Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di
Gampong Blang Aceh Indonesia)**



Elliza¹⁾, Taufiq¹⁾, Muslina^{1*)}

¹Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Aceh Indonesia

*Corresponding author: muslina@uinsuna.ac.id

To cite this article:

Elliza, E., Taufiq, T., & Muslina, M. (2025). Analisis Swasembada Pangan di Tingkat Desa Melalui Pendekatan Partisipatif (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Blang Aceh Indonesia). *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis) : Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(6), 603–614. <https://doi.org/10.37149/jia.v10i6.2374>

Received: August 11, 2025; **Accepted:** December 24, 2025; **Published:** December 29, 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Village-Owned Enterprise (BUMG) of Gampong Blang in strengthening community food security through the agriculture and plantation management program. To delineate the impacts of BUMG program implementation on enhancing economic access, promoting sustainable utilization of local resources, and improving the welfare of beneficiary communities to foster the long-term sustainability of community-based food security. Primary data sources include interviews with the village head, all BUMG managers, and thirty community members who are beneficiaries of the program. Additionally, observations and documentation serve as supporting data for the interviews, which are subsequently analyzed using a descriptive qualitative approach. The results show the role and impact of BUMG in enhancing food security for the community of Gampong Blang from several aspects: (1) The Gampong Blang BUMG in Aceh has successfully created 12,800 hectares of rice fields with a total of 16 farmers receiving benefits in 2023, who must pay 300 thousand, while the garden land produces chilies, cucumbers, papayas, and vegetables from 1,600 meters of land with a turnover of 12 million in 2023. (2) According to the theoretical review of Community-Based Food Security, BUMG is a key actor in realizing community participation, smooth economic access, and utilization of local resources to ensure the sustainability of food programs. (3) Managing profits from the BUMG program to improve community welfare in various areas, including education, consumption expenses, business capital, home renovations, and health sector incentives. All of these initiatives stem from developing the region's potential, starting with enhancing competencies.

Keywords: agricultural; BUMG; food security; rural economy.

PENDAHULUAN

Isu ketahanan pangan menjadi isu global terkait ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat di dunia (Kurniadi et al., 2025) termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, program ketahanan pangan merupakan prioritas utama di tahun 2025 dengan mengangarkan dana sebesar Rp. 129,4 Triliun (Benny Eko, 2024) Melalui dana tersebut, Pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan sektor pertanian, memperkuat ekonomi pedesaan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan (Benny Eko, 2024). Saat ini realisasi anggaran semester awal tahun 2025 mencapai Rp. 46,9 Triliun atau 32,7% dari perencanaan proteksi pemerintah atas pangan nasional (Masitoh, 2025). Arah kebijakan pemerintah saat ini adalah mendukung swasembada pangan fokus pada penyediaan beras (Kementerian Pertanian, 2025). Strateginya ialah membenteng Brigade Pangan (BP) guna mempercepat modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan melibatkan generasi muda (Pusat Pelatihan Pertanian, 2024).

Kebijakan di atas merupakan langkah strategi pemerintah untuk melakukan hilirisasi pertanian di tengah maraknya konversi lahan seperti Kabupaten Bogor dengan tingkat konversi



81,95% per tahun (Sitorus & Novindra, 2011). Demikian juga di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2010-2014, lahan yang telah beralih fungsi mencapai 42,61 ha/tahun (Mulyono & Nugroho, 2016). Hal serupa juga terjadi di Provinsi Bengkulu dari tahun 2010-2015 laju konversi mencapai 4.022 Ha (Zamhari et al., 2019). Tidak jauh berbeda berlaku di Kabupaten Padang Pariaman dengan total konversi 185,83 Ha dari area sawah 886,66 Ha (Arliaus et al., 2017). Meskipun permasalahan tersebut termasuk dalam kategori menahun dan berlangsung hingga saat ini seperti peralihan area sawah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh (Pane et al., 2024). Ancaman ini akan terus terjadi jika masyarakat minim kesadarannya akan krisis pangan.

Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang revitalisasi lahan sawah mulai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan keputusan Menteri Pertanian (Pedoman Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2019). Semua kebijakan itu akan berdampak jika pemerintah mampu mensinergikan pembangunan sektor pertanian dan mengubah pola pertanian masyarakat ke arah pemanfaatan teknologi modern (Syuhada, 2017). Salah satu wujud dari sinergi tersebut daerah adalah melakukan kolaborasi program ketahanan pangan dengan melibatkan pemerintah daerah hingga unit terkecil dari suatu wilayah yakni desa. Hanya saja jika melibatkan BP sebagai pioneer ketahanan pangan dengan pola kemitraan 70:30 sebagaimana dijelaskan dalam Buku Saku Brigade Pangan (Pusat Pelatihan Pertanian, 2024), maka motivasi petani untuk lebih produktif akan menurun sebab mereka sebagai pemilik lahan hanya mendapatkan bagian 30% dari hasil pengelolaan sawah.

Solusi berbeda ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh berupa dukungan penuh atas proses pertanian di *gampong* tersebut mulai dari pelatihan, penyediaan lahan sawah hingga proses pengelolaan hasil. Lebih spesifik program swasembada pangan pada BUMG menggunakan sistem sewa kepada masyarakat dengan memanfaatkan dana desa untuk memperluas area sawah yang kini telah terdapat 32 *gupang* atau 1,28 Ha hasil pengembangan dari tahun 2016. Angka ini tidak terlihat signifikan jika dibandingkan dengan target pemerintah tahun 2025 yakni 225 ribu Ha (Prasetyo, 2025). Bila dibandingkan dengan luas wilayah hanya 92 Ha, maka sekecil apapun upaya BUMG memberikan dampak positif bagi masyarakat terlebih jika menilai jumlah penduduk relatif lebih kecil hanya 563 Jiwa (BPS Kabupaten Aceh Utara, 2024). Selain itu, lahan sawah mencapai 40 Ha disusul dengan perluasan lahan perkebunan milik BUMG 0,16 Ha, sisa perumahan penduduk, pertokoan dan tempat usaha masyarakat lainnya. Hal ini juga didorong oleh program percontohan sawah berlangsung konsisten sejak tahun 2019 dengan cetak 2 *gupang* pertahun atau 800 meter.

Faktor pendukung lainnya adalah profesi masyarakat sebagai petani mencapai 30% dari total penduduk di *gampong* Blang atau 173 petani. Menilai kenyataan tersebut, maka sangat layak program BUMG di arahkan ke sektor pertanian dengan luas sawah mencapai 43% dari seluruh luas *gampong*. *Gampong* relatif kecil namun program BUMG memberikan kontribusi nyata swasembada pangan di tingkat lokal dalam mendukung program nasional. Tidak berhenti disitu, BUMG juga menjadi lembaga yang aktif melatih dan mengedukasi masyarakat dengan berbagai pelatihan guna meningkatkan produktivitasnya hasil taninya.

Berbagai terobosan BUMG di atas hanya gambaran kecil pelaksanaan program swasembada pangan di *Gampong* Blang. Untuk gambaran menyeluruh, pembahasan berikut ini menjelaskan jenis-jenis program, metode pelaksanaan hingga dampak bagi kesejahteraan masyarakat di *Gampong* Blang. Kajian sejenis telah dilakukan oleh Rahman dkk fokus pada peran BUMDes Kelurahan Karangrejek Kapanewon Wonorasi melalui program penyediaan air bersih, usaha kredit mikro dan pengembangan agribisnis di tingkat desa (Rahman et al., 2024). Jika ditelusuri lebih lanjut, peran lembaga ini dalam mendukung ketahanan pangan belum terlaksana secara optimal sebab air sebagai sumber pokok dalam pertanian belum memenuhi kebutuhan tersebut dan pihak BUMG masih fokus pada penyediaan air bersih dan air minum masyarakat. Jika menilai arah kajian tersebut, masih pada tahap penyediaan fasilitas pendukung berupa saluran irigasi dan modal bukan penyediaan instrumen utama pertanian seperti sawah, bibit dan peningkatan skill sebagaimana diaktualisasikan oleh BUMG di *Gampong* Blang. Lain halnya dengan kajian Triyono yang membahas secara peran BUMDES dalam mendukung petani kecil untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan (Triyono, 2025). Kajian ini memiliki fokus sama namun metode berbeda, dalam studi tersebut pendekatannya adalah kajian kepustakaan, sementara kajian ini mengambil objek kasus yang nyata pada salah satu desa di Aceh. Lainnya Sinarwati dkk yang fokus meninjau peran BUMDes untuk meningkatkan kegiatan pengrajin dalam menghasilkan produk ekspor (Sinarwati et al., 2025).

Sementara eksistensi BUMG di Aceh telah diperkenalkan melalui program bantuan modal bagi sektor perekonomian dan perdagangan (Maimun et al., 2022). Selanjutnya Sofia dan Liyana membahas tentang program BUMG masih fokus pada sewa-menyewa kebutuhan adat mulai tratak, sound system dan lainnya serta penyaluran air bersih (*pesimas*) (Sofia & Liyana, 2023). Demikian

juga, Program BUMG di Gampong Sawang masih fokus pada jasa penyewaan barang untuk kegiatan resepsi pernikahan atau acara adat serta acara-acara sejenis lainnya bukan pada sektor pertanian desa (Kamaruddin et al., 2025).

Beberapa kajian di atas tidak sejalan dengan tujuan penelitian ini yakni (1) Menganalisis peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui program pengelolaan pertanian dan perkembunan; (2) Selanjutnya menganalisis relevansi program teori Community-Based Food Security (CBFS) yang menempatkan BUMG sebagai aktor utama yang memberikan akses pangan bagi masyarakatnya.

MATERI DAN METODE

Bentuk penelitian adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus intrumental yang merupakan hasil pengembangan dari Creswell (Creswell, 2012). Melalui pendekatan ini fenomena di gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron dapat diuraikan secara komprehensif guna memberikan cerminan bagi isu yang berkembang saat ini tentang Brigade Pangan telah lebih dulu diperkenalkan oleh BUMG di wilayah tersebut.

Sumber data utama adalah data primer dari observasi dan wawancara dengan perangkat desa yakni pak *keushik*, kepala BUMG serta seluruh pelaksana program BUMG. Bentuk wawancara dengan pihak tersebut ialah semi terstruktur untuk memberikan ruang pengembangan informasi mengenai pelaksanaan program BUMG di Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya, wawancara juga melibatkan 30 penerima manfaat langsung dari program BUMG berupa 6 penerima sewa tanah, 3 pekerja di kebun BUMG, 2 penyewa ruma, 2 penyewa teratak, 2 penyewa toko, 3 penerima beasiswa anak, 3 penerima layanan kesehatan, 2 rehap rumah, dan 7 manfaat langsung lainnya. Alasan melibatkan informan tersebut ialah untuk memberikan ilustrasi menyeluruh mengenai manfaat program BUMG bagi masyarakat yang telah dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber data pendukung adalah dokumentasi dari kantor *keushik* Gampong Blang, artikel, buku serta dokumentasi dari website yang memiliki manfaat dalam menganalisis kasus swasembda pangan di daerah tersebut. Jika diuraikan lebih lugas maka tahapan penelitian ini untuk menjawab tujuan 1 dan 2 adalah:

1. Observasi kegiatan BUMG di Gampong Blang mengenai asset riil yang digunakan dalam program BUMG dapat ditemukan posisinya berupa lahan sawah dan perkembunan serta dapat menggambarkan proses pemanfaatan asset tersebut.
2. Wawancara meliputi tiga tahap yakni (1) wawancara awal dengan dengan *keushik*/kepala desa untuk gambaran awal program peran BUMG dan posisinya di desa; (2) *Indept interview* dengan Syamsul Bahri (Ketua BUMG), Amir Mahmud (Sekretaris BUMG) dan Bendara BUMG (Azhari). Melalui wawancara tersebut, seluruh program BUMG dapat ditelusuri mulai dari klasifikasi, jumlah anggaran, alokasi anggaran, strategi pelaksanaan program, keuntungan dari program dan dampak program bagi masyarakat; dan (3) Wawancara tertutup dengan 30 masyarakat dengan mendesain bentuk pertanyaan yang hanya terdapat pilihan jawab guna mengkonfirmasi program swasembda pangan di daerah tersebut.
3. Mengumpulkan berbagai dokumentasi pendukung seperti data laporan keuangan, data penduduk, data penerima manfaat, foto pelaksanaan program dan data pendukung lainnya dalam bentuk artikel serta buku referensi tentang keistimewaan Aceh, regulasi, qanun, pertanian dan sejenisnya.
4. Menguji kebasahan data dengan mencari sinkronisasi antara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik uji triangulasi penelitian melalui pendekatan sumber di mana informan dari pihak BUMG akan dikonfirmasi datanya melalui masyarakat sebagai penerima manfaat. Selain itu, triangulasi juga menggunakan metode berbeda, data observasi dikonfirmasi dengan data wawancara dan dokumentasi, begitu juga data wawancara dikonfirmasi dengan metode dokumentasi dan observasi.
5. Menghubungkan hasil penelitian dengan teori Community-Based Food Security (CBFS) untuk melihat peran BUMG dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
6. Tahap akhir analisis data deskripsi melalui langkah reduksi (pemilihan data), *display* (menyajikan data dalam pola tertentu), *conclusion drawing* (membuat kesimpulan awal) sesuai dengan Miles & Huberman (Miles & Huberman, 1994) agar data dapat mudah dipahami oleh pembaca.

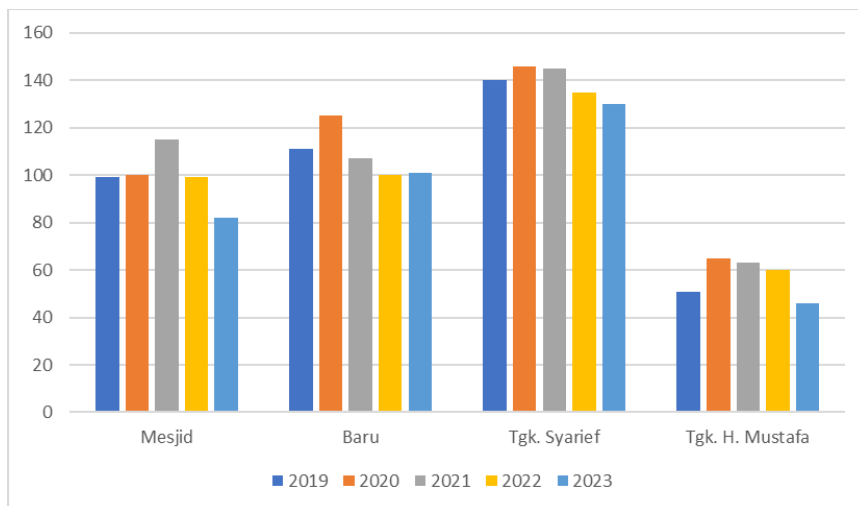
Berdasarkan seluruh proses penelitian di atas dengan pendekatan studi kasus instrumental, maka hasil kajian ini dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan BUMG (BUMDes) dalam memberikan manfaat langsung dan tidak langsung dari program utama di sektor pertanian kepada masyarakatnya yang dapat diimplementasikan pada BUMG di wilayah lain. Berikut ini uraian

komprehensi terkait program BUMG sebagai swasembada pangan di tingkat desa dalam pendekatan partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

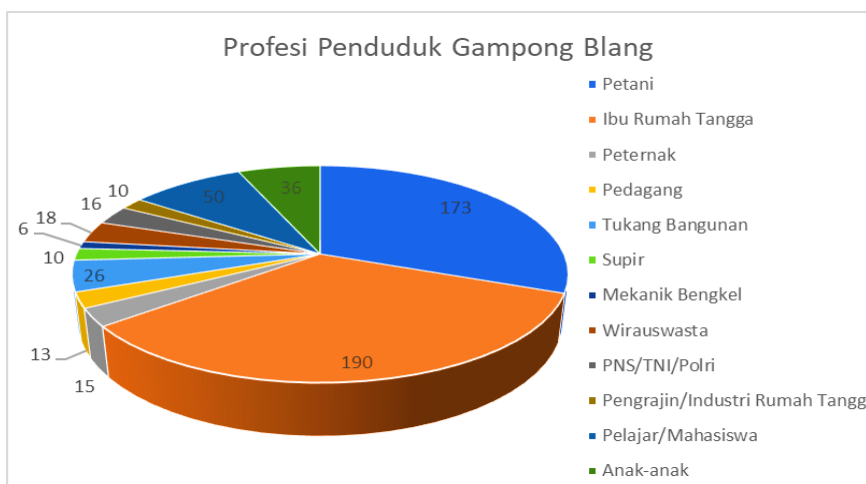
Swasembada Pangan di Gampong Blang, Aceh

Penyebutan *gampong* dan BUMG adalah hasil dari penyesuaian Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan ketentuan Qanun tersebut, BUMG di Aceh memiliki tiga peran utama (1) Pioneer perekonomian *gampong*; (2) Sumber Pendapatan Asli Daerah; dan (3) sarana percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong. Melalui peran tersebut, BUMG Gampong Blang menjelma sebagai swasembaga pangan dengan program perluasan area sawah, produktivitas lahan perkembunan, pembentukan koperasi untuk menampung hasil perkembunan, dan memberdayakan masyarakat sebagai pekerja yang aktif membantu pelaksanaan seluruh program BUMG. Meskipun mengandalkan prinsip kekeluargaan dan solidaritas dengan teknologi pertanian yang berhasil diakses, namun BUMG telah memberikan dampak positif bagi penurunan kemiskinan masyarakat yang terlihat dari penurunan kemiskinan masing-masing dusun di Gampong Blang mulai dari dusun Mesjid, Baru, Tgk. Syarief dan Tgk. H. Mustafa sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Tingkat kemiskinan masyarakat Gampong Blang

Menilai kondisi di atas, dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tergambar di atas. Selanjutnya sebaran profesi masyarakat mendukung program utama BUMG di sektor pertanian, yakni:



Gambar 2. Profesi masyarakat Gampong Blang

Pendirian BUMG merupakan hasil musyawarah antar masyarakat serta bertempat di kantor keuchik Gampong Blang. Tujuan awal pembentukan adalah mengelola potensi *Gampong* agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat *Gampong* Blang melalui unit usaha BUMG *Gampong* Blang yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan, kios dan penyewaan rumah serta teratak.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gampong Blang dalam memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus utama kajian ini adalah menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *Gampong* Blang dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan meninjau program dalam konteks swasembada pangan melalui teori Community Base Food Security yang dikembangkan oleh Menurut Maxwell & Smith (1992) dan Narayan (2002). Program utama BUMG terkait pangan:

1. Mencetak dan Mengelola Sawah

Ruang lingkup program ini meliputi perluasan lahan sawah dan penyewaan sawah secara bergilir kepada masyarakat. Tujuannya ialah menawarkan solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan sawah tetapi mempunyai minat dan kompetensi mengelola sawah. Lahan sawah hasil dari perluasan adalah milik *gampong* yang dikelola oleh BUMG dengan sistem sewa kepada masyarakat. Perencanaan program telah dicanangkan saat pendirian BUMG pada tahun 2015. Saat itu, *gampong* hanya memiliki dua gupang atau 800 meter sawah. Sementara animo masyarakat untuk mendapatkan giliran penyewaan terus meningkat sebab harga sewa yang sangat terjangkau yakni Rp. 300.000 per panen dengan luas tanah 800 meter.

Peningkatan minat tersebut, menimbulkan dorongan kuat dari segala struktural desa termasuk pengelola BUMG untuk menganggarkan dana dalam jumlah besar di tahun awal pendiriannya. Alhasil tahun 2016, *gampong* telah berhasil mencetak sawah baru 10 *gupang* atau 4.000 Meter. Dengan penambahan luas tersebut, jumlah masyarakat yang mendapatkan giliran dari 1 orang pertahun menjadi 6 orang.

Setelah tahun 2016, program perluasan sawah tersebut sebab berhenti dan mulai kembali di tahun 2019 hingga saat ini. Mulai tahun 2019, Keuchik dan pengelola BUMG sepakat secara konsisten dan berkesinambungan untuk mencetak 2 *gupang* per tahun. Perkembangan terakhir di tahun 2023, *Gampong* Blang telah memiliki lahan sawah 32 *gupang* atau 12.800 meter dengan 16 petani yang mendapatkan giliran per tahun

Unit usaha penyewaan lahan sawah adalah unit usaha yang paling menonjol yang di kelola oleh BUMG *Gampong* Blang yang bergerak dibidang pertanian berupa penyewaan lahan sawah kepada masyarakat. Hadirnya unit usaha ini merupakan jawaban atau solusi pada masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki lahan sawah milik pribadi. Pada awalnya lahan sawah yang dimiliki oleh BUMG *Gampong* Blang sejak awal didirikan bumg pada tahun 2015 hanya 800 meter saja atau 2 gupang. hingga saat ini jumlah lahan sawah milik BUMG *gampong* blang meningkat menjadi 32 gupang atau 12.800 meter. Jumlah lahan sawah milik bumg *gampong* blang pada tahun 2019 sampai dengan 2023 bertambah sebanyak 20 gupang atau 8.000 meter karena *Gampong* Blang mempunyai potensi berupa lahan sawah yang luas. Dengan adanya lahan sawah ini pemerintah BUMG *Gampong* Blang melihat bahwa ada peningkatan animo masyarakat. Program BUMG dibagian penyewaan lahan sawah ini dikelola langsung oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan sawah yang dipanen 2 kali dalam 1 tahun. Dengan harga sewa lahan sawah milik bumg sebesar Rp. 300.000 dalam luas tanah sawah 800 meter atau 2 gupang.

Pada awalnya, program ini merupakan hasil pertimbangan mendalam dari para perangkat desa dengan melihat potensi *gampong* serta banyaknya daerah yang kini melakukan konversi lahan sawa menjadi bangunan. Hingga akhirnya, perangkat desa melalui aktualisasi peran BUMG menggencarkan alih fungsi lahan kosong menjadi lahan sawah produktif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam perluasan area sawah tersebut adalah Melakukan survei terhadap lahan yang ingin di cetak.seperti tekstur tanah,kesediaan sumber air dan nfrastuktur pendukung lainnya disekitar lokasi yang ingin di cetak sawahnya. Memastikan bahwa tanah tersebut tidak ada *overlapping* dengan pihak lain. Melibatkan masyarakat *Gampong* Blang dalam proses cetak sawahnya. Lahan sawah yang telah selesai dicetak kemudian itu akan di data dan dijadikan lahan sawah milik *Gampong* Blang nantinya akan di sewakan kepada masyarakat.

Setelah serangkaian proses perluasan dilakukan, pihak BUMG turut andil dalam memberikan penyuluhan pertanian untuk menambah pengetahuan masyarakat. Beberapa tema penyuluhan yang telah dilakukan ialah pemberantasan hama padi, metode pengairan dilahan pertanian, dampak positif dan negatif penggunaan pupuk yang berlebihan dan teknik pemupukan yang benar. Kegiatan ini melibatkan dinas pertanian dan ditujukan kepada semua petani di *Gampong* Blang. pematerinya dari pihak dinas pertanian. Kemudian BUMG bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk

menyediakan bibit unggul, pupuk bersubsidi kepada petani, baik itu petani sawah maupun petani kebun. Kedepan, pemerintah Gampong Blang berupaya meningkatkan lahan sawah milik *Gampong* dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat yang tidak mempunyai lahan sawah milik pribadi dan kekurangan harta untuk membeli beras serta mendorong masyarakat untuk berusaha dan juga diharapkan dapat mengatasi krisis pangan. Program ini sejalan dengan hasil studi modal sosial dan penguatan lembaga petani di Kutai Kartanegara. Faktor kepercayaan, jaringan, dan kolaborasi lokal terbukti meningkatkan kemungkinan keberlanjutan program pangan komunitas (Lesmana et al., 2025a).

Langkah strategis BUMG di atas pernah berlaku di desa Bontomanurung Kabupaten Maros yakni pemberdayaan masyarakat kelas menengah ke bawah, melalui pelatihan ketahanan pangan berbasis ramah lingkungan. Pelatihan tersebut mencakup proses penyiapan media tanam, tata cara budidaya tanaman pangan, proses perawatan dan pengendalian penyakit tanaman menggunakan bahan-bahan alami, serta praktik pembuatan POC (*Pupuk Organik Cair*) (Husain & Kaslam, 2023).

2. Mengelola Perkebunan

BUMG *Gampong* Blang menjalankan usaha perkembunan mulai dari cabai, pepaya, jagung, mentimun dan menggunakan sistem tumpang sari. Lahan ini milik gampong blang dan dikelola langsung oleh masyarakat. Program pengelolaan lahan perkebunan berbekal modal Rp. 40.000.000 dengan lahan 1.600 meter untuk menanam komoditi cabai sebagai *supply* kebutuhan rumah tangga. Masa tanam komoditas tersebut adalah dua kali per tahun dan pernah menghasilkan 1,3 ton cabai pada tahun 2023. Harga juga pada saat itu adalah Rp 40.000 – Rp 45.000 per kg. Sehingga di tahun tersebut, BUMG menghasilkan laba Rp. 12.000.000 dari total penjualan Rp. 58.500.000;.

Alasan pihak BUMG tidak menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat adalah BUMG dapat menciptakan peluang kerja yang lebih kepada masyarakat khususnya punya kemauan dan kompetensi. Jika diserahkan bergiliri kepada masyarakat kemungkinan besar tidak memberikan efek merata dan tidak dapat memastikan hasil kebun yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Menilai alasan tersebut, maka program ini memiliki tujuan jangka panjang, di mana pihak pengelola saat ini fokus pada pepaya, cabai, jagung dan sayur. Selanjutnya, pihak BUMG berencana menanam kakao atau kepala karena permintaan pasar yang tinggi atas hasil pertanian tersebut. Di samping itu dalam proses penanaman tanaman menggunakan sistem tumpang sari dan pemupukan organik. Program tersebut mendukung pemenuhan pangan masyarakat desa serta berperan mengurangi pengurangan masyarakat (Yusida et al., 2021).

Jika menilai rencana dan proses di atas, program ini terlihat sederhana namun dampaknya signifikan bagi masyarakat terutama hasil panen kebun tersebut akan dipasarkan di Gampong Blang melalui unit usaha kios milik BUMG dengan harga di bawah harga pasar khusus untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan juga bentuk penciptaan lapangan kerja baru bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, pengelolaan perkebunan yang terstruktur oleh pihak BUMG memastikan produktivitasnya lebih optimal, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk kesejahteraan gampong. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi *gampong* melalui pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Ini merupakan langkah penguatan jaringan produk dengan membuka pasar pasar untuk hasil pertanian sehingga memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat (Lesmana et al., 2025b).

Selain program utama di atas, pihak BUMG juga melanjutkan program sebelumnya seperti pengelolaan kios untuk mendukung program perkembunan yakni menampung hasil pertanian–kemudian menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga pasar. Selanjutnya juga memiliki 2 rumah singgah yang ditujukan kepada pengantin baru sebelum sanggup membangun rumah sendiri.

Dengan adanya berbagai program usaha yang dikelola oleh BUMG *Gampong* Blang, masyarakat *gampong* tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga memiliki kesempatan bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan gampong secara mandiri dan berkelanjutan. Seluruh program di atas merupakan hasil pengelolaan dana APBG yang harus dipertanggungjawabkan secara terperinci dan memberikan dampak bagi pembangunan *gampong*.

Pembahasan di atas merupakan pengembangan konsep ketahanan pangan berbasis komunitas serta peran sentral institusi lokal dalam menjaga ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat. Konsep ini pernah dikaji oleh Sharma dalam kaitan sistem pangan berbasis komunitas, program swasembada, dan keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat kapasitas komunitas dalam mekanisme penyediaan pangan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi dan lingkungan (Sharma, 2024). Studi lanjutan juga menunjukkan bahwa sistem ketahanan pangan berbasis komunitas menegaskan penerapan prinsip

kedaulatan pangan yang berfungsi sebagai sistem logistik yang kuat, sekaligus menjadi praktik terbaik (*best practice*) dalam mendukung pertahanan negara secara non-militer (Mustika et al., 2025).

Selanjutnya dalam kaitan dampak sistem komunitas lokal juga pernah di baha oleh Feenstra yakni komunitas lokal terbukti membantu memperkuat ekonomi lokal, menambah pendapatan petani, dan memperluas akses pangan, sehingga memberikan kontribusi pada ketahanan pangan yang lebih luas (Feenstra, 1997). Alhasil, program BUMG yang mengembangkan pangan berbasis sumber daya lokal bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah, diversifikasi produk, dan peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan (Bantacut, 2013). Secara keseluruhan BUMG dapat dikatakan sebagai lembaga intervensi partisipatif yang melibatkan komunitas dalam merancang dan mengimplementasikan strategi ketahanan pangan lokal (Doustmohammadian et al., 2022). Hal ini tercermin dari program pelatihan dan kelembagaan BUMG.

Relevansi Program dengan Teori Community Base Food Security (CBFS)

Berdasarkan program swasembada pangan di atas, jika ditinjau dalam teori teori Community Base Food Security (CBFS) maka dimensi dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Relevansi CBFS dengan program BUMG Gampong Blang

No	Dimensi CBFS	Makna Teori	Impelementasi pada BUMG Gampong Blang
1	Ketersediaan Pangan (Availability)	Komunitas memiliki kemampuan memproduksi dan menyediakan pangan secara lokal melalui optimalisasi sumber daya alam.	Program perluasan lahan sawah yang dilakukan BUMG meningkatkan produksi padi, sehingga memperkuat ketersediaan pangan di tingkat gampong.
2	Akses terhadap Pangan (Accessibility)	Masyarakat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap sumber pangan, baik melalui kepemilikan, sewa, maupun harga terjangkau.	Sistem penyewaan lahan sawah bergilir memberi peluang bagi masyarakat tanpa lahan untuk tetap berproduksi dan memperoleh hasil panen sendiri.
3	Akses terhadap Pangan (Accessibility)	Masyarakat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap sumber pangan, baik melalui kepemilikan, sewa, maupun harga terjangkau.	Sistem penyewaan lahan sawah bergilir memberi peluang bagi masyarakat tanpa lahan untuk tetap berproduksi dan memperoleh hasil panen sendiri.
3	Pemanfaatan (Utilization)	Pengetahuan, teknologi, dan praktik pertanian/gizi yang baik menjamin pemanfaatan pangan secara optimal dan berkelanjutan.	Penyuluhan pertanian yang dilakukan BUMG bersama Dinas Pertanian meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan, pupuk, dan pengairan.
4	Stabilitas (Stability)	Sistem pangan komunitas harus tahan terhadap perubahan atau guncangan (ekonomi, iklim, sosial).	Program perkebunan tumpang sari (cabai, pepaya, jagung) menciptakan diversifikasi sumber pangan dan pendapatan, memperkuat stabilitas ekonomi-pangan jangka panjang.

Sumber: (Maxwell & Smith, 1992; Narayan, 2002)

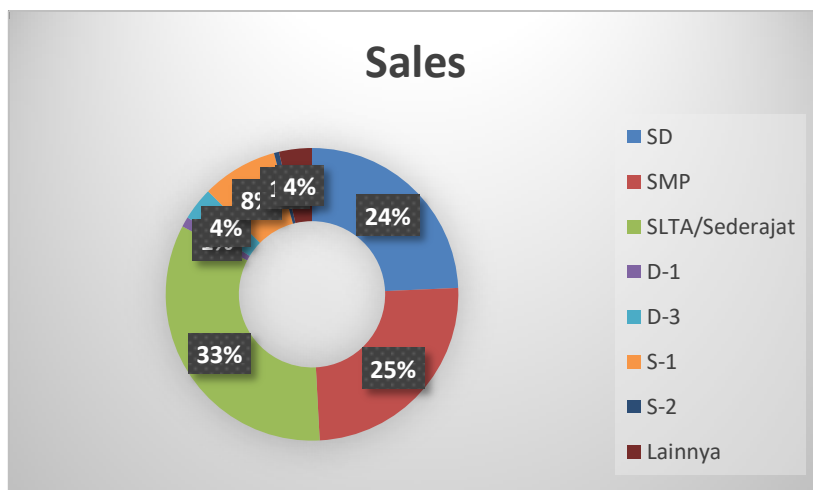
Tabel di atas menghubungkan teori CBFS dengan program BUMG, lebih lanjut konsep ini menggambarkan pemberdayaan komunitas terwujud apabila masyarakat memperoleh kendali atas sumber daya, proses, dan lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka (Narayan, 2002; North, 1990). Dalam konteks BUMG Gampong Blang, BUMG berperan sebagai instrumen kelembagaan pemberdayaan (*institutional empowerment*) yang memperluas akses masyarakat terhadap lahan produktif dan pekerjaan.

Sementara eksistensi BUMG sebagai lembaga daerah dipandang kuat apabila berfungsi sebagai ataran main yang menata hubungan sosial-ekonomi masyarakat dalam mengelola sumber daya bersama (North, 1990; Ostrom, 1990). Prinsip ini tercermin pada pengelolaan sawah dan kebun oleh BUMG secara kolektif, di mana keuntungan dan manfaat dikembalikan untuk kesejahteraan

gampong. Sebagaimana yang dilakukan oleh BUMG dengan laba bersihnya tahun 2023 mencapai Rp. 80.000.000 dengan program bantuan langsung berikut ini:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah indikator kuncur mendorong kesejahteraan berkelanjutan, karena pendidikan adalah bekal yang paling esensial bagi anak-anak sebagai persiapan menuju kehidupan yang lebih baik. Tingkat pendidikan selalu berbanding lurus dengan peluang kerja dan tingkat penghasilan. Berdasarkan data yang berhasil ditelusuri maka profil pendidikan masyarakat di Gampong Blang adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Blang

Tujuan dari bantuan pendidikan ini adalah untuk memperkuat komitmen BUMG dalam memfasilitasi akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. BUMG menyoroti realitas sosial di Gampong Blang, di mana mungkin ada kelompok masyarakat yang enggan membantu anak-anak mereka dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Sehingga BUMG menyisihkan keuntungan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak yatim dan kurang mampu. Adapun nominal dana yang disiapkan BUMG tahun 2023 sebesar atau Rp 6.400.000. Kriteria penerima manfaat yaitu anak yatim yang masih usia sekolah atau berasal dari keluarga kurang mampu. Bentuk bantuan ini adalah bantuan langsung berupa perlengkapan alat tulis, tas dan uang saku sebesar Rp 300.000 untuk satu orang. Langkah ini merupakan bukti nyata dari kepedulian nya terhadap generasi muda yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik. Dengan bantuan ini diharapkan penerimanya dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang guna mencegah terjadinya kesenjangan pendidikan untuk anak usia sekolah.

2. Pengeluaran konsumsi

Kebiasaan konsumsi *Gampong Blang* sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sementara orang dengan pendapatan yang lebih tinggi dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan non-makanan seperti investasi, perawatan kesehatan, dan pendidikan, mereka yang berpenghasilan lebih rendah biasanya menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk konsumsi makanan.

Sebagai bentuk kepedulian BUMG untuk daya beli masyarakat adalah memberikan peluang kerja kepada masyarakat seperti menjadi karyawan BUMG atau partisipasi dalam program dijalankan oleh BUMG. Harapannya, masyarakat yang ikut serta bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari sebelumnya sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

3. Bantuan Modal Usaha

BUMG Gampong Blang menyalurkan sebagian dana dari laba program yang telah dijalankan oleh BUMG sebesar Gampong Blang dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000 untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat. Salah bentuk dukungan tersebut adalah pemberian modal usaha kepada pelaku home industri yang ada di Gampong Blang jumlah dana yang dibeikan sebesar Rp

2.000.000 untuk satu pelaku usaha. Dengan demikian, program memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya.

Penyaluran modal ini dilakukan dengan sistem pengajuan dari masyarakat kepada pihak BUMG Gampong Blang. Masyarakat yang memiliki usaha rumahan atau berencana memulai home industri dapat emengajukan permohonan modal kepada pihak BUMG Gampong Blang. Dan nantinya akan di telaah berdasarkan kelayakan usaha, potensi pengembangan, serta dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan ini BUMG Gampong Blang memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif yang berkelanjutan.

4. Perumahan dan lingkungan

BUMG Gampong Blang berfungsi sebagai lembaga sosial yang ikut membangun kebutuhan perumahan masyarakat desa. Salah satunya pengalokasian dana dari laba BUMG Gampong Blang ialah program rehabilitasi rumah yang kurang layak huni bagi masyarakat kurang mampu sebesar atau Rp. 6.400.000 dalam setahun dengan sistem pengajuan oleh si pemilik rumah ke aparatur gampong yang nantinya akan di survei kembali oleh pihak aparatur gampong.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi fisik yang tidak memadai ,seperti atap bocor, didinding rapuh, lantai tanah, atau sanitasi yang buruk. dengan adanya dukungan dari BUMG Gampong Blang. Rumah-rumah tersebut dapat diperbaiki agar menjadi tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan sehat. Selain rehabilitasi rumah juga ada kegiatan perbaikan lingkungan sekitar. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.

5. Kesehatan

Bidang kesehatan BUMG Gampong Blang mengalokasikan sebagian dari labanya sebesar Rp. 7.200.000 untuk program bantuan sosial di bidang kesehatan yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Inisiatif ini menunjukkan bahwa BUMG Gampong Blang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi kepedulian terhadap kualitas hidup masyarakatnya.

Salah satu program yang dijalankan BUMG Gampong Blang adalah penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat gampong seperti cek kolestrol, cek gula darah atau pemeriksaan mata. Program ini sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. dengan adanya pemeriksaan rutin seperti ini, masyarakat bisa lebih cepat mengetahui kondisi kesehatannya.

Kegiatan sosial dibidang kesehatan ini juga berkolaborasi dengan puskesmas atau tenaga medis setempat untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan baik. masyarakat yang sehat memiliki kapasitas kerja dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi gampong dengan lebih optimal.

Intisari sub bagian ini adalah Implementasi program cetak dan pengelolaan sawah dan perkebunan BUMG Gampong Blang mencerminkan penerapan langsung dari teori *Community-Based Food Security* melalui Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, perluasan, dan pengelolaan lahan (Chambers, 1997). Akses ekonomi yang inklusif, melalui sistem sewa murah dan kesempatan kerja di kebun (Narayan, 2002). Pemanfaatan sumber daya lokal (tanah, air, tenaga kerja, pengetahuan lokal) untuk meningkatkan produksi pangan (Scoones, 1998). Penguatan kelembagaan desa melalui peran BUMG sebagai lembaga ekonomi yang menjamin keberlanjutan program pangan (Uphoff, 1986)

Kajian ini dapat mendukung rekomendasi penelitian sebelumnya yakni konsep inovasi terbuka dari Wulandari dan Wardani yang dapat meningkatkan kinerja badan usaha milik desa (Wulandari & Wardani, 2024), dalam kaitan ini beberapa terebosan berani dari BUMG dapat dikatakan sebagai inovasi terbuka yang memiliki dampak ekonomi dan sosial masyarakat serta memberikan peningkatan kinerja bagi lembaga.

Di tambah lagi Undang-undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, meningkatkan kemandirian, dan menata pemerintahan desa, serta mengatur berbagai aspek seperti kewenangan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan masa jabatan kepala desa. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya mengembalikan harkat serta martabat desa agar menjadi desa yang berdaya menghadapi ketidaksiapan kapasitas desa (Sujito & Ghofur, 2022). Konsekuensinya mendorong BUMDes untuk meningkatkan kapasitasnya dalam penyediaan fasilitas bagi masyarakat (Rahayu et al., 2024).

Sementara kajian Azhari yang menyatakan Dana Desa lebih signifikan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan desa di bandingkan peran BUMG (Azhari et al., 2022), tidak sejalan dengan hasil kajian ini sebab evaluasi program BUMG di Gampong Blang, dan desa malah lebih diarahkan ke pembangunan infratraktur desa sementara pemberdayaan masyarakat di ambil alih oleh BUMG. Demikian juga jika di bandingkan dengan peran BUMG Jeulanga Mata le Banda Dua Pidie Jaya, Aceh yang belum menunjukkan hasil signifikan disebabkan oleh kapasitas dan kemampuan pengelola (Razi et al., 2024).

Temuan dalam penelitian ini BUMG Gampong Blang berhasil mengembangkan potensi sumber daya lokal meliputi SDA dan SDM melalui sektor pertanian, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat. BUMG Gampong Blang tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan yang mampu mengangkat potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi. Guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

BUMG Gampong Blang memiliki peran strategi sebagai lembaga yang memperluas ketersediaan pangan sekaligus membuka akses ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. Perluasan lahan dari 800 meter (2015) menjadi 12.800 meter (2023) dengan sistem sewa bergilir yang terjangkau, disertai penyuluhan dan dukungan input pertanian, membuktikan bahwa BUMG tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai penggerak pemberdayaan petani dan perlindungan lahan pangan produktif berbasis komunitas. Selanjutnya program perkembunan juga ikut memperkuat ketahanan pangan melalui diversifikasi komoditas (cabai, pepaya, jagung, mentimun, sayur) sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal dan stabilitas akses pangan. Pengelolaan yang terstruktur, pemasaran hasil melalui kios desa dengan harga di bawah pasar, serta pemanfaatan laba untuk sektor sosial (pendidikan, kesehatan, modal usaha, perumahan). Hal ini menegaskan bahwa BUMG menjadi aktor sentral dalam keberlanjutan ketahanan pangan berbasis komunitas dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Hasil penelitian selaras dengan teori teori *Community-Based Food Security*, di mana BUMG menjadi pilar penguatan: ketersediaan pangan, akses ekonomi yang inklusif, optimalisasi sumber daya lokal, penguatan modal sosial, serta keberlanjutan kelembagaan desa. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa di Gampong Blang, BUMG mengambil alih peran pemberdayaan masyarakat yang belum dioptimalkan oleh Dana Desa, sehingga model ini menjadi contoh keberhasilan ketahanan pangan yang digerakkan oleh institusi lokal dan partisipasi komunitas. Secara keseluruhan kajian dapat memberikan contoh positif bagi lembaga sejenis untuk mengembangkan potensi di desanya masing-masing. Sementara secara institusional, BUMG dapat bergabung dengan progam Brigade Pangan dari Kementan guna mempeluas akses atas teknologi pertanian hingga mendukung program yang telah direalisasikan. Selanjutnya, bagi penelitian sejenis dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan berbeda atau metode berbeda seperti mengukur keberlanjutan program secara longitudinal dengan melihat stabilitas produksi pangan, resiliensi iklim, dan keberlanjutan ekonomi petani binaan BUMG. Atau menggunakan pendekatan mixed-method dengan menambahkan analisis kuantitatif pada aspek produktivitas, kontribusi pendapatan rumah tangga, dan pengurangan kerentanan pangan.

REFERENSI

- Arliaus, F., Ekaputra, E. G., & Tasrif, G. (2017). Identifikasi kawasan rawan konversi pada lahan sawah di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman berbasis GIS (geographic information system). *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas*, 21(2), 93–102. <https://doi.org/10.25077/jtpa.21.2.93-102.2017>
- Azhari, A., Yusuf, M., Kamaruddin, K., & Fadly, F. (2022). Are village funds and village-owned enterprises crucial for eradicating poverty in Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*, 9(2), 132–138. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.132-138>
- Bantacut, T. (2013). Pembangunan ketahanan ekonomi dan pangan perdesaan mandiri berbasis nilai tambah. *Jurnal Pangan*, 22(2), 181–196. <https://doi.org/10.33964/jp.v22i2.87>
- Benny Eko, S. (2024, October 24). Rp139,4 triliun untuk ketahanan pangan: Prioritas 2025. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3777-rp139,4-trilyun-untuk-ketahanan-pangan-prioritas-2025.html>
- BPS Kabupaten Aceh Utara. (2024). *Kecamatan Syamtalira Aron dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara. <https://acehutarakab.bps.go.id/id/publication/2024>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Doustmohammadian, A., Mohammadi-Nasrabadi, F., Keshavarz-Mohammadi, N., Hajjar, M., Alibeyk, S., & Hajigholam-Saryazdi, M. (2022). Community-based participatory interventions to

- improve food security: A systematic review. *Frontiers in Nutrition*, 9, 1028394. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1028394>
- Feenstra, G. W. (1997). Local food systems and sustainable communities. *American Journal of Alternative Agriculture*, 12(1), 28–36. <https://doi.org/10.1017/S0889189300007165>
- Husain, & Kaslam. (2023). Konsep pemberdayaan masyarakat menuju ketahanan pangan berbasis pertanian ramah lingkungan Desa Bontomanurung, Kabupaten Maros. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 8(1), 14–36. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v8i1.38111>
- Kamaruddin, Habibi, K., & Riyanti. (2025). Strategi pengelolaan BUMG dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gampong Sawang Ba'u. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 306–315. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i2.288>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025, April 17). Kementan perkuat ketahanan pangan nasional lewat brigade pangan. *BBPP Binuang*. <https://bbppbinuang.bppsdp.pertanian.go.id/berita/kementan-perkuat-ketahanan-pangan-nasional-lewat-brigade-pangan>
- Kurniadi, R., Umbu, H. K., Ernawati, Hidayati, Stepanus, M., Sholeh, P. A., Ratnaningtyas, E. M., Muhammad, N., Iriansa, Mutmainnah, Ulidesi, S., & Yuliani, W. (2025). *Isu-isu ketahanan pangan* (1st ed.). Lingkar Edukasi Indonesia.
- Lesmana, D., Nurfillah, S., & Aini, Q. (2025a). Strengthening farmers' institutions based on social capital in supporting food security in Kutai Kartanegara District, Indonesia. *Journal of Agriculture and Ecology Research International*, 26(3), 78–89. <https://doi.org/10.9734/jaeri/2025/v26i3677>
- Lesmana, D., Nurfillah, S., & Aini, Q. (2025b). Strengthening farmers' institutions based on social capital in supporting food security in Kutai Kartanegara District, Indonesia. *Journal of Agriculture and Ecology Research International*, 26(3), 78–89. <https://doi.org/10.9734/jaeri/2025/v26i3677>
- Maimun, Elfida, C., & Wahyudi, I. (2022). Peran badan usaha milik gampong (BUMG) dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i2.1683>
- Masitoh, S. (2025, July 3). Realisasi anggaran ketahanan pangan Rp49,9 triliun hingga semester I-2025. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-anggaran-ketahanan-pangan-rp-499-triliun-hingga-semester-i-2025>
- Maxwell, S., & Smith, M. (1992). Household food security: A conceptual review. *IDS Discussion Paper*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Mulyono, J., & Nugroho, H. (2016). Dampak konversi lahan sawah terhadap produksi padi di Kabupaten Bantul. In *Prosiding Seminar Nasional Membangun Pertanian Modern dan Inovatif Berkelanjutan* (pp. 967–973). <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6885>
- Mustika, W., Almubaraq, H. Z., & Hartono, U. (2025). Strategi penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas di Kesepuhan Sinarresmi. *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(4), 479–502. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i4.8778>
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-5166-4>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Pane, M. M., Juliaviani, N., Mujiburrahmad, M., & Kasimin, S. (2024). Pengaruh konversi lahan persawahan pasca pembangunan jalan tol Banda Aceh–Sigli terhadap sustainable livelihood petani. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 9(3), 47–62. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v9i3.30827>
- Pedoman fasilitasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), Pub. L. No. 01/Kpst/RC.210/B/01/2019 (2019). Kementerian Pertanian Republik Indonesia. https://psp.pertanian.go.id/storage/120/Pedoman_Fasilitasi_PLP2B_TA_2019.pdf
- Prasetyo, A. I. (2025, May 25). Program cetak sawah tahun 2025: Upaya strategis menuju swasembada pangan. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/program-cetak-sawah-tahun-2025-upaya-strategis-menuju-swasembada-pangan>
- Pusat Pelatihan Pertanian. (2024). *Buku saku brigade pangan* (Vol. 1). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

- Rahayu, M. J., Mukaromah, H., & Mulyanto, M. (2024). Social capital-based strategy of sustainable village-owned enterprises (BUMDes) development. *International Journal of Social Economics*, 51(3), 297–312. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2022-0700>
- Rahman, N., Yuniasih, A. W., & Nurlaela, S. (2024). Peran badan usaha milik desa dalam mendukung ketahanan pangan. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 19(2), 140–151. <https://doi.org/10.51852/jpp.v19i2.678>
- Razi, S. F., Saiban, K., & Hariyanto, T. (2024). Governance of the gampong-owned business entity (BUMG). *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 5(1), 121–141. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2024.1.10>
- Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72).
- Sharma, V. (2024). Empowering local food security. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 14(1), 1–23. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2024.141.006>
- Sinarwati, N. K., Budhi, M. K. S., Utama, M. S., & Marhaeni, A. (2025). Entrepreneurship, performance, and welfare. *Jurnal Economia*, 21(1), 64–80. <https://doi.org/10.21831/economia.v21i1.60263>
- Sitorus, S. M., & Novindra. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Kabupaten Bogor* (Unpublished undergraduate thesis). IPB University.
- Sofia, E., & Liyana, C. I. (2023). Evaluasi program badan usaha milik gampong (BUMG). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(1), 12–24. <https://doi.org/10.29103/jsds.v9i1.10289>
- Sujito, A., & Ghofur, M. (2022). Nurturing food sovereignty from the periphery. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 305–316. <https://doi.org/10.22500/10202243672>
- Syuhada, S. (2017). Upaya pemantapan ketahanan pangan nasional melalui revitalisasi sektor pertanian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(3), 118–128. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v14i3.269>
- Triyono. (2025). The role and strategy of village-owned enterprises (BUMDes) in strengthening food security. *The Journal of Academic Science*, 2(5), 1550–1561. <https://doi.org/10.59613/m9jysd34>
- Uphoff, N. T. (1986). *Local institutional development: An analytical sourcebook with cases*. Kumarian Press.
- Wulandari, F., & Wardani, M. K. (2024). Open innovation in village-owned enterprises. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2350079. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2350079>
- Yusida, E., Mauliddin, A. F., & Puspaningrum, A. (2021). Community movement in independent vegetable growing. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/10.21776/jiscos.ub.01.01.02>
- Zamhari, A., Utama, S. P., & Mersyah, R. (2019). Ekonomi konversi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.31186/naturalis.8.1.9156>